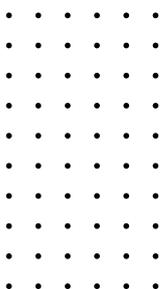
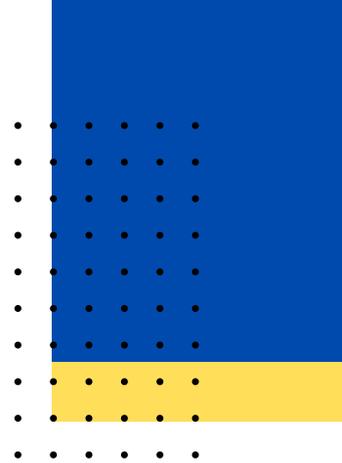


PENDIDIKAN UNTUK SEMUA: PENTINGNYA PEMERATAAN PEMBANGUNAN SEKOLAH NEGERI DI KABUPATEN SIDOARJO

Arinda Reihansyah Achsanti
222020100189

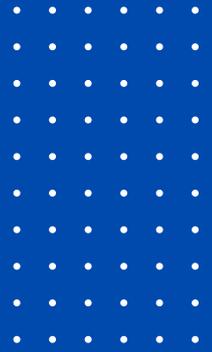


RINGKASAN EKSEKUTIF



Pemerataan pembangunan sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo merupakan urgensi yang mendesak. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah menyebabkan banyak anak tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata. Pemerataan ini penting untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan berkualitas, tanpa terpengaruh oleh lokasi geografis. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan adanya sistem zonasi, jumlah sekolah negeri yang tidak merata semakin menyulitkan siswa dan orang tua. Oleh karena itu, langkah strategis untuk pembangunan sekolah negeri harus segera diambil untuk menjamin pendidikan yang adil dan merata bagi semua anak di Kabupaten Sidoarjo.

Adapun dasar hukum utama yang digunakan merujuk pada Pasal 31 UUD 1945 tentang Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Negara juga memiliki otoritas untuk mendesak terciptanya perlindungan hukum terhadap hak asasi setiap warga negara khususnya untuk mendapatkan pendidikan. Hadirnya hak untuk mendapatkan pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.



PENDAHULUAN

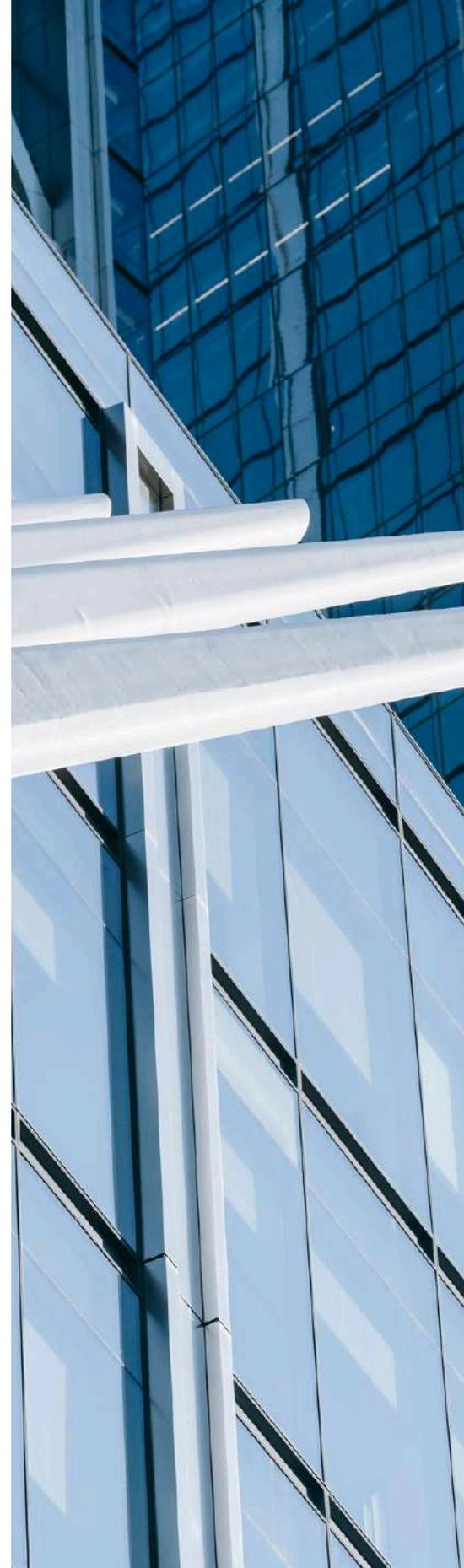
Sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengajaran nasional. Pendidikan nasional harus menjangkau seluruh rakyat dan bukan hanya sebagian kecil, agar dapat membangun masyarakat yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

Pemerataan pembangunan sekolah negeri merupakan isu penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945. Di Kabupaten Sidoarjo, ketimpangan akses pendidikan menjadi tantangan signifikan. Meskipun Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang berkembang pesat di Jawa Timur, distribusi sekolah negeri dari jenjang SD hingga SMA/SMK masih belum merata di seluruh wilayah. Hal ini mengakibatkan kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah dan menyulitkan pelaksanaan sistem zonasi yang bertujuan untuk mendekatkan siswa dengan sekolah terdekat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan sekolah negeri yang lebih banyak dan merata semakin mendesak untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan pendidikan yang adil dan berkualitas. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk memperbaiki distribusi fasilitas pendidikan guna mewujudkan visi pemerataan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan pada laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, jumlah sekolah negeri mulai dari jenjang SD hingga SMA/SMK yang ada di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sebanyak 35 untuk jenjang SD, 6 untuk jenjang SMP, 13 untuk jenjang SMA, dan 4 untuk jenjang SMK.

Data menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri yang ada masih belum merata, menyebabkan kesulitan bagi siswa dan orang tua dalam sistem zonasi. Ketimpangan ini menyebabkan sebagian besar siswa harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah terdekat, khususnya di daerah terpencil. Implementasi sistem zonasi, yang mengharuskan siswa mendaftar di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal, memperburuk masalah ini. Orang tua yang ingin anak-anak mereka bersekolah di sekolah negeri, yang biayanya lebih terjangkau dibandingkan sekolah swasta, seringkali kesulitan menemukan sekolah negeri yang dekat dan memadai. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun memperparah kebutuhan akan lebih banyak sekolah negeri untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan pendidikan yang layak dan merata tanpa memandang lokasi geografis mereka.

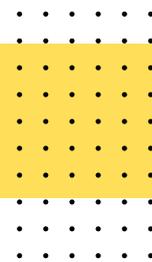


PENYEBAB KURANG MERATANYA PEMBANGUNAN SEKOLAH NEGERI DI SIDOARJO

1. Distribusi Guru: Penyebaran guru berkualitas masih belum merata, dengan sebagian besar guru terbaik terkonsentrasi di sekolah-sekolah perkotaan.
2. Aksesibilitas: Anak-anak di daerah pedesaan seringkali menghadapi kesulitan akses menuju sekolah karena kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai.
3. Anggaran: Alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata mengakibatkan perbedaan signifikan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di berbagai wilayah.



REKOMENDASI



Pengalokasian Anggaran yang Merata

Pemerintah daerah harus memastikan alokasi anggaran yang adil dan merata untuk semua sekolah, terutama di daerah pedesaan yang jarang sekali diperhatikan keberadaannya.



Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur

Investasi dalam pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, serta pengembangan infrastruktur transportasi untuk memudahkan akses ke sekolah bagi siswa di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian kendaraan bermotor.



Distribusi Guru Berkualitas

Program insentif untuk guru yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil, serta pelatihan berkala untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata.



REFERENSI

- Lukman Hakim (2016), Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-tentang-pendidikan-dalam-uud-1945-lt6451cc49192a5/>
- <https://sma.kemdikbud.go.id/direktorat/index.php/berita/tantangan-mewujudkan-pemerataan-kualitas-pendidikan-di-indonesia-melalui-kebijakan-sistem-zonasi>
- <https://www.kompasiana.com/ajeng92305/6554fe14110fce65002360c2/masalah-pemerataan-pendidikan-di-indonesia>